



Dinas Pendidikan Awasi Pungutan Liar

UMBULHARJO (MERAPI) - Pihak sekolah jenjang TK, SD dan SMP negeri di Kota Yogyakarta diingatkan untuk tidak melakukan pungutan liar atau pungli. Pasalnya biaya operasional sekolah pada pendidikan dasar SD-SMP sudah ditanggung Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Kami sudah menerbitkan surat edaran tentang larangan pungli dan gratifikasi. Surat edaran ini bagian dari upaya pencegahan pungli PPDB," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Suasana, Kamis (13/7).

Dalam surat edaran itu diingatkan seluruh panitia PPDB dilarang melakukan pungli dalam bentuk apapun. Termasuk kepada orangtua atau wali murid pada satuan pendidikan di Kota Yogyakarta agar tidak memberikan gratifikasi kepada kepala sekolah, guru, karyawan dan panitia lainnya sehubungan dengan pelaksanaan PPDB dan kegiatan belajar mengajar lainnya.

Menurutnya, potensi pungli PPDB di Kota Yogyakarta selama ini kecil dan cenderung tidak ada. Sejak pendaftaran, daftar ulang sampai siswa diterima. Hal itu karena penyelenggaraan PPDB dan biaya operasional sekolah pada pendidikan dasar telah ditanggung dana BOS dari pemerintah pusat. Sekolah negeri juga dilarang mengadakan seragam dan buku kebutuhan

siswa. "Sekolah hanya memberikan aturan seragam secara tertulis dan contoh seragamnya. Orangtua diminta mencari seragam sendiri. Buku juga sama karena pengadaannya sudah masuk paket BOS," terangnya.

Setiap rencana peningkatan kualitas pendidikan siswa di luar biaya operasional sekolah, maka sekolah wajib berembung dengan orangtua siswa baru bersama komite sekolah. Dia menyampaikan hal itu diatur dalam peraturan walikota terkait komite sekolah. Nantinya, lanjutnya, orangtua siswa kelas 7 atau siswa baru yang menjadi komite tidak tetap bersama pengurus komite tetap berembung dengan sekolah. "Peraturannya sudah jelas. Tidak boleh ada pungli apapun," tegas Edy.

Tahapan PPDB jenjang SMP negeri di Kota Yogyakarta saat ini memasuki masa pendaftaran ulang bagi calon siswa yang telah lolos seleksi nilai. Daftar ulang siswa baru dimulai kemarin dan Jumat (14/7).

Kepala Divisi Pemantauan dan Investigasi Forum Pemantau Independen Kota Yogyakarta Baharudin Kamba menyebut dari hasil pemantauan PPDB di jenjang SMP Negeri belum ada temuan indikasi pungli. Termasuk laporan pungli dari masyarakat. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005